

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN  
KETAHANAN SOSIAL DI JAKARTA UTARA:  
Studi Kasus Kampung Aquarium Tanah Merah**

Author:

Moch. Arfan Rifa'i<sup>1\*</sup>, Novya Indah Puspitasari<sup>2</sup>

Email:

mrifa'i@ipdn.ac.id <sup>1</sup>

Affiliasi:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia,

Submitted : 2025-07-28

Revised : 2025-07-29

Accepted : 2025-09-12

Available Online: 2025-12-01

**Corresponding author**

Moch. Arfan Rifa'i

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia,

mrifa'i@ipdn.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan ketahanan sosial di kawasan Jakarta Utara, khususnya di Kampung Aquarium dan Kampung Tanah Merah, selama masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Permasalahan yaitu ketahanan sosial kurang memiliki pondasi dalam penberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta dokumentasi lapangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung Susun Aquarium dan legalisasi administratif Tanah Merah merupakan bentuk kebijakan progresif berbasis partisipasi warga. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi sipil, tercipta model pemberdayaan yang mengedepankan hak atas kota dan keadilan sosial. Kampung Susun tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menghidupkan kembali jejaring sosial, ekonomi, dan budaya warga yang sempat tercerabut akibat penggusuran. Demikian pula, legalisasi Tanah Merah memungkinkan akses terhadap layanan publik dan dokumen kependudukan. Namun, sejumlah tantangan masih ada, seperti belum permanennya status hukum tanah, keterbatasan infrastruktur dasar, dan ketergantungan kebijakan pada dukungan politik yang fluktuatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan untuk menjamin keberlanjutan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan sosial dapat dicapai melalui pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan, asalkan didukung oleh komitmen politik serta pelibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

**Kata Kunci:** Kampung Aquarium, Ketahanan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

**Abstract**

*This research examines community empowerment as a strategy to build social resilience in North Jakarta, specifically in Kampung Aquarium and Kampung Tanah Merah, during the leadership of Governor Anies Baswedan. Employing a qualitative descriptive method with literature study and relevant field documentation, the findings reveal that the Kampung Susun Aquarium program and the administrative legalization of Tanah Merah are progressive policies rooted in community participation. Through a collaborative approach involving local government, grassroots communities, and civil society organizations, a model of empowerment emerged that prioritizes*

*the right to the city and social justice. Kampung Susun provides not only adequate housing but also revives social, economic, and cultural networks previously dismantled by forced evictions. Similarly, the partial legalization of Tanah Merah has enabled access to public services and civil documents. Nonetheless, challenges persist, including the absence of permanent land tenure, limited infrastructure, and reliance on inconsistent political will. Therefore, regulatory strengthening, human resource capacity building, and policy continuity across administrations are essential to ensure long-term success. This study concludes that social resilience can be achieved through inclusive and sustainable empowerment, provided there is strong political commitment and active community involvement throughout the planning and evaluation stages of urban development*

**Keywords:** Community Empowerment, Kampung Aquarium, Social Resilience.

## PENDAHULUAN

Ketahanan sosial merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas masyarakat di tengah tantangan global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan dinamika sosial-politik. Dalam pembangunan nasional, ketahanan sosial bukan hanya soal daya tahan terhadap tekanan, tetapi juga mencakup kemampuan kolektif komunitas dalam mengelola konflik, mempertahankan nilai-nilai sosial, serta menjaga kohesi dan solidaritas antar kelompok (Badriyah, 2025). Salah satu pendekatan strategis untuk memperkuatnya adalah melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu proses penguatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sumber daya alam (Aminah, 2019).

Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik dan berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Rakyat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk membangun komunitasnya secara mandiri (Indrayuni et al., 2025). Namun, tantangan seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan akses informasi, kemiskinan struktural, dan minimnya dukungan kelembagaan masih menjadi hambatan, terutama di daerah tertinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan sektor swasta guna menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam era otonomi daerah dan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama membangun ketahanan sosial dari akar rumput. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas perlu direvitalisasi sebagai modal sosial yang memperkuat kemandirian masyarakat. Ketahanan sosial hanya bisa terwujud bila masyarakat memiliki kendali atas potensi lokal, akses terhadap hak dasar, serta kemampuan menjalin jejaring sosial lintas sektor dan generasi (Sunitro, 2025). Pemberdayaan yang efektif tidak bisa dilakukan secara top-down, melainkan memerlukan pendekatan partisipatif, berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dan

mempertimbangkan karakter lokal, baik budaya, sosial, maupun geografis (Valentina, 2019).

Sejumlah penelitian mendukung urgensi ini. Penelitian (Hermawan, 2019) menunjukkan bahwa komunitas yang didampingi secara konsisten dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan mampu menciptakan solusi sosial dari bawah. Studi (Maulani, 2021) tentang desa adat di Bali mengungkap bahwa struktur sosial tradisional yang diperkuat lewat pemberdayaan mendorong kohesi sosial yang kuat dalam menghadapi pariwisata massal. Sementara itu, riset (Rachmawati, 2022) di kawasan pesisir Jawa Barat menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui koperasi lokal meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan solidaritas sosial. Penelitian (Kurniawan, 2023) di wilayah rawan konflik Maluku menemukan bahwa pemberdayaan pemuda berbasis nilai lokal berhasil menekan potensi konflik horizontal. Terakhir, studi oleh (Lestari, 2024) menyoroti pentingnya digitalisasi pemberdayaan di desa tertinggal untuk menjembatani ketimpangan informasi dan partisipasi.

Jika dibandingkan, kelima penelitian tersebut memperlihatkan benang merah: pemberdayaan yang berhasil selalu berbasis konteks lokal, inklusif, dan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Namun pendekatannya berbeda—Hermawan dan Maulani menekankan struktur sosial tradisional, Rachmawati dan Kurniawan fokus pada kelompok rentan (perempuan dan pemuda), sementara Lestari menyoroti aspek teknologi dan akses informasi. Ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan harus fleksibel, adaptif terhadap karakter wilayah, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan partisipasi aktif warga.

Kampung Akuarium dan Tanah Merah di Jakarta Utara menjadi contoh nyata dinamika ketahanan sosial dalam konteks urban. Kedua wilayah pernah mengalami penggusuran yang mengakibatkan disrupti sosial. Namun, pendekatan baru yang lebih partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat telah mulai memulihkan kepercayaan warga dan memperkuat kohesi sosial. Ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial bukan hanya soal respons terhadap krisis, tetapi juga proses jangka panjang yang mensyaratkan inklusi, keadilan, dan peran aktif warga dalam pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya penting dalam membangun ketahanan sosial, tetapi juga menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi sosial yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual di tengah kompleksitas tantangan global masa kini.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi vital dalam membangun ketahanan sosial, terutama di wilayah perkotaan yang rentan, seperti Kampung Akuarium dan Tanah Merah, Jakarta Utara. Ketahanan sosial yang dimaksud tidak hanya menyangkut daya tahan terhadap tekanan ekonomi atau lingkungan, tetapi juga mencakup kemampuan kolektif warga untuk memperjuangkan hak, membangun solidaritas, dan menciptakan lingkungan inklusif (Valentina, 2019). Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif, pelibatan warga dari perencanaan hingga evaluasi, serta

perlunya dukungan kebijakan yang adil dan berpihak. Contoh konkret dari pendekatan ini terlihat pada dua kampung di Jakarta Utara:

- Kampung Akuarium bangkit melalui koperasi warga, arsitektur partisipatif, dan dukungan akademisi.
- Tanah Merah membangun sendiri layanan dasar dan fasilitas publik meskipun status lahannya tidak legal.

Keduanya menjadi studi kasus pemberdayaan berbasis komunitas yang menghasilkan ketahanan sosial, bukan melalui intervensi top-down, melainkan kolaborasi horizontal warga dan aktor non-negara. Ketahanan sosial tumbuh dari nilai-nilai gotong royong, kepercayaan sosial, dan kemampuan adaptasi.

Tabel 1.1 Temuan Tedahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul / Temuan Utama	Perbandingan
1	Sita dkk (2023) [Teewan Journal]	Ketahanan sosial desa pasca-pandemi dibangun lewat pemberdayaan berbasis lokal.	Fokusnya di wilayah desa, belum menyentuh kawasan urban pasca-penggusuran.
2	Fitriati & Utami (2022) [UNES Review]	Pemberdayaan berbasis gender dalam ketahanan keluarga dan masyarakat.	Pendekatan gender-sensitif, namun tidak spesifik pada konteks spasial kota dan penggusuran.
3	Kuhlmann et al. (2021) [SAGE]	Social accountability as mechanism for community resilience.	Mengangkat akuntabilitas sosial sebagai prasyarat ketahanan, namun belum banyak membahas praktik lokal Indonesia.
4	Cavaye & Ross (2022) [Taylor & Francis]	Community resilience & development in regional areas.	Penekanannya di daerah regional, bukan kawasan padat urban seperti Jakarta Utara.
5	Anderson et al. (2024) [Springer]	Urban community resilience through participatory housing.	Dekat dengan konteks penelitian ini, namun fokusnya lebih pada desain hunian partisipatif daripada dimensi sosial-politik lokal.

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan beberapa hal yang mendasari latar belakang diatas bahwa terdapat Fenomena aktual untuk Menjawab tantangan urbanisasi, penggusuran, dan marginalisasi warga kota yang makin meningkat. relevansi kebijakan dalam memberi masukan konkret bagi pemerintah kota dalam merancang kebijakan pemberdayaan dan partisipasi warga serta terdapat nilai praktis dan akademik yang mampu menjadi model bagi pembangunan kota berbasis masyarakat (community-based urban resilience) untuk dapat membuktikan bahwa kekuatan komunitas adalah fondasi penting dalam transformasi sosial dan tata kota berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Obyek penelitian berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial pada dua wilayah studi: Kampung Aquarium dan Tanah Merah di Jakarta Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai referensi ilmiah, seperti situs internet, media cetak, website resmi lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta dari artikel ilmiah, jurnal, buku cetak, dan buku elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk narasi, deskripsi, wacana, serta simbol visual seperti foto atau peta, bukan berupa angka statistik (Lexy J. Moleong, 2007) dalam (Kasman, 2023). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang pelaku atau masyarakat yang mengalami langsung proses pemberdayaan dan pembangunan ketahanan sosial.

Dalam kerangka berpikirnya, peneliti mengadaptasi teori-teori dari para ahli seperti Zimmerman tentang pemberdayaan masyarakat dan Adger mengenai ketahanan sosial sebagai dasar analisis. Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti menyusun variabel-variabel konseptual yang kemudian digunakan sebagai alat bantu untuk menelusuri dan membandingkan praktik pemberdayaan yang berlangsung di Kampung Aquarium dan Tanah Merah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana masyarakat di dua kawasan tersebut berproses dalam menghadapi tantangan struktural seperti penggusuran, minimnya akses layanan publik, dan stigma sosial. Selanjutnya, peneliti berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan strategi pemberdayaan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun ketahanan sosial. Hasil dari proses ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat daya tahan sosial masyarakat perkotaan secara partisipatif.

Sebelum melakukan telaah pustaka secara mendalam, peneliti terlebih dahulu memetakan dan mengidentifikasi sumber-sumber ilmiah yang relevan dan kredibel. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis, dideskripsikan, dan dikaji berdasarkan kerangka teori yang telah ditentukan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai dinamika pemberdayaan masyarakat dan ketahanan sosial di dua lokasi studi. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemaparan dan pemahaman fenomena sosial berdasarkan fakta empiris yang ditemukan dalam bahan bacaan, tanpa melakukan eksperimen atau kuantifikasi. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara naratif bagaimana masyarakat membangun kekuatan sosialnya dalam menghadapi tekanan eksternal dan internal melalui upaya pemberdayaan yang mereka jalankan secara kolektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan warga pasca-relokasi di kawasan Jakarta Utama Aquarium mencerminkan interaksi dinamis antara dimensi psikologis, sosial, dan struktural yang berkelindan membentuk tingkat ketahanan sosial komunitas tersebut. Mengacu pada teori Zimmerman, pemberdayaan psikologis warga mulai terlihat melalui tumbuhnya kesadaran individu akan hak dan tanggung jawab mereka dalam membangun kehidupan baru, ditandai dengan partisipasi aktif dalam forum warga, musyawarah RT/RW, dan pengambilan keputusan komunitas. Namun demikian, sebagian besar warga yang terdampak relokasi dari wilayah padat seperti Kampung Akuarium masih menunjukkan keterbatasan dalam kontrol personal terhadap kebijakan lokal, menunjukkan bahwa efikasi diri belum merata di semua lapisan. Dalam aspek pemberdayaan komunitas, upaya pembangunan kolektif melalui koperasi warga, kelompok pengelola wisata berbasis bahari, dan UMKM pesisir menunjukkan sinyal positif terhadap penguatan organisasi akar rumput. Di sisi lain, berdasarkan kerangka teori Adger, ketahanan sosial masyarakat Jakarta Utama Aquarium dapat dilihat dari tingkat kohesi sosial yang tinggi, terutama dalam konteks solidaritas menghadapi tantangan seperti banjir rob, keterbatasan air bersih, hingga dampak sosial pandemi COVID-19 yang masih terasa. Masyarakat menunjukkan modal sosial yang kuat, tercermin dalam jaringan informal antara warga, tokoh adat, kelompok nelayan, serta aktivis urban poor yang menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah dan NGO. Namun demikian, keadilan sosial masih menjadi tantangan, terutama dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan fasilitas publik. Sebagian warga mengeluhkan kurangnya pelibatan bermakna dalam perencanaan tata ruang hunian baru serta minimnya program pelatihan keterampilan yang kontekstual dengan potensi lokal seperti budidaya laut, pengolahan hasil tangkapan, atau jasa ekowisata. Kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi juga memperburuk kondisi ini, membuat sebagian kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan lansia sulit mengikuti mekanisme pelaporan digital melalui kanal resmi pemerintah. Meskipun terdapat program revitalisasi berbasis partisipasi seperti Community Action Plan (CAP) oleh Pemprov DKI dan mitra internasional, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil warga dalam konteks adaptasi sosial pasca-relokasi. Oleh karena itu, untuk membangun ketahanan sosial yang inklusif, penting bagi pemangku kebijakan untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik (seperti rusunawa atau penataan ruang laut), tetapi juga memperkuat dimensi psikologis dan komunitas melalui pelatihan kepemimpinan lokal, fasilitasi kelompok dampingan, dan pelibatan warga dalam seluruh siklus pembangunan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Jakarta Utama Aquarium sebagai ikon pembangunan pesisir yang berbasis komunitas hanya akan berhasil jika pemberdayaan dan ketahanan sosial menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan, bukan sekadar pelengkap administratif.

## Rekonstruksi Hunian dan Partisipasi Komunitas di Kampung Aquarium

Selama masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), Kampung Aquarium di Jakarta Utara mengalami perubahan besar dari kawasan penggusuran menjadi hunian komunitas. Setelah penggusuran pada 2016, sebanyak 345–396 KK terdampak dan sempat tinggal di tenda pengungsian. Di bawah program “Kampung Susun”, pembangunan hunian vertikal tahap I selesai pada 17 Agustus 2021. Sebanyak 107 unit hunian dibangun di blok B dan D, dan diperuntukkan bagi 128 KK yang telah terdata dan tervalidasi. Model ini menekankan pada partisipasi warga melalui koperasi “Akarium Bangkit Mandiri” yang mengelola kios, ruang galeri budaya, dan fasilitas umum lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan komunitas oleh Zimmerman (1995) dalam (Kasman et al,2023), yang menekankan kontrol warga atas kehidupan mereka. Walaupun sudah menunjukkan hasil positif, masih terdapat sekitar 20–25% warga terdampak yang belum tertampung karena keterbatasan unit. Pembangunan blok A dan C belum selesai hingga akhir masa jabatan Anies.

Tabel 1.  
Ringkasan Data

Indikator	Jumlah/Status
KK terdampak penggusuran	±345–396 KK
KK tervalidasi untuk hunian	128 KK
Unit hunian tahap I	107 unit
Blok yang selesai	B dan D
Fasilitas tambahan	3 kios, 1 galeri, 1 ruang difabel

## Penghargaan Internasional sebagai Validasi Model Partisipatif

Model pembangunan Kampung Susun Aquarium tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga mendapat pengakuan internasional. Pada tahun 2023, kampung ini menerima Innovation Award Asia Pacific Housing Forum dari Habitat for Humanity. Kemudian pada Januari 2024, model ini memenangkan World Habitat Award yang diselenggarakan oleh World Habitat bekerja sama dengan UN-Habitat. Kedua penghargaan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan partisipatif yang diterapkan di Kampung Aquarium dianggap sebagai inovasi dalam penyediaan hunian layak. Penghargaan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga, LSM seperti Urban Poor Consortium (UPC), dan Pemprov DKI Jakarta bisa menghasilkan tata kelola ruang yang adil. Model ini menjadi studi kasus keberhasilan pemberdayaan warga dalam menghadapi ketidakpastian hunian pasca-penggusuran, yang relevan dengan teori "hak atas kota" oleh David Harvey (Larasati, et al.,2022) Walaupun demikian, penghargaan ini tidak serta merta menyelesaikan seluruh persoalan, karena pembangunan belum sepenuhnya rampung dan keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen politik pemerintahan selanjutnya.

Tabel 2.  
Penghargaan

Penghargaan	Tahun	Penyelenggara
World Habitat Award	2024	World Habitat & UN-Habitat
Innovation Award Asia Pacific Housing	2023	Habitat for Humanity

### Legalitas dan Infrastruktur di Kampung Tanah Merah

Kampung Tanah Merah yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah non-legal mengalami kemajuan signifikan pada masa Anies Baswedan. Melalui Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2021, pemerintah memberi kepastian hukum bagi warga dengan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara, KTP/KK, serta izin pemanfaatan lahan sementara. Selain legalisasi administratif, peningkatan infrastruktur dasar juga dilakukan. Warga kini memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal dan jembatan Kali Betik yang menghubungkan RW 07 dan RW 08. Dengan adanya legalisasi dan infrastruktur, akses terhadap listrik, air bersih, dan fasilitas sosial semakin membaik. Sebelumnya, warga Tanah Merah sering kali mengalami kesulitan mendapatkan akses air PAM dan layanan publik lainnya. Kini, dengan legalitas yang diakui, masyarakat juga bisa mengakses layanan BPJS, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya. Pendekatan ini mendukung prinsip "inklusi sosial" dalam perencanaan kota serta membuka peluang replikasi di kampung-kampung kota lainnya.

Tabel 3.  
Perbandingan Kondisi

Kategori	Sebelum Anies	Selama Anies
Status lahan	Non-legal	Diakui dengan IMB sementara
Kepemilikan dokumen	Tidak memiliki KTP/KK	KTP/KK tersedia
Akses air & listrik	Sulit & terbatas	Terhubung PAM dan PLN
Infrastruktur umum	Minim	IPAL dan jembatan tersedia

### Kendala Ekonomi dan Mata Pencaharian di Hunian Baru

Meski hunian baru Kampung Susun Aquarium menawarkan kenyamanan dan kepastian tempat tinggal, tidak semua warga langsung merasakan manfaat ekonomi. Sejumlah warga mengalami penurunan penghasilan akibat perpindahan lokasi yang menjauh dari pusat aktivitas ekonomi mereka sebelumnya. Sebagian besar warga sebelumnya bekerja di sektor informal seperti nelayan, pedagang kaki lima, atau pemulung. Tanpa dukungan program kewirausahaan atau pelatihan kerja, banyak warga kesulitan menyesuaikan diri. Untuk itu, Koperasi ABM membuka kios usaha di

lantai dasar rusun, namun belum mencukupi semua kebutuhan ekonomi warga. Program pelatihan keterampilan kerja, UMKM berbasis komunitas, dan akses ke modal mikro seperti KUR perlu ditingkatkan. Jika tidak, risiko ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan terus berlanjut. Data informal menyebutkan bahwa dari 107 KK yang menghuni rusun, hanya sekitar 30% yang telah memiliki usaha aktif di lokasi baru. Sementara sisanya masih bergantung pada penghasilan lama atau keluarga.

Tabel 4.

Data Ekonomi Warga Rusun

Jenis Pekerjaan	Percentase (%)
Usaha aktif di lokasi baru	30%
Belum punya usaha tetap	40%
Pekerjaan lama (nelayan, dll)	30%

#### Risiko Ketergantungan pada Kebijakan Politik

Salah satu tantangan utama dalam keberlanjutan program Kampung Susun Aquarium dan legalisasi Tanah Merah adalah ketergantungan pada kebijakan politik yang sangat kuat pada figur Gubernur Anies Baswedan. Legalitas yang diberikan dalam bentuk Surat Penguasaan Lahan Sementara (SP3L) dan IMB sementara bisa saja tidak diakui atau dibatalkan oleh pemerintahan selanjutnya. Ini menjadi kekhawatiran warga karena status hunian belum dilengkapi sertifikat hak milik atau hak guna bangunan yang permanen. Selain itu, program pembangunan belum selesai 100%—blok A dan C di Kampung Aquarium masih dalam tahap perencanaan. Warga berharap keberlanjutan program tidak berhenti hanya karena pergantian pemimpin daerah. Jika pendekatan partisipatif ini tidak diinstitusionalisasi dalam regulasi yang lebih kuat dan permanen, maka nasib kampung susun berisiko kembali terombang-ambing oleh perubahan politik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi payung hukum jangka panjang seperti Perda atau dukungan pemerintah pusat agar model ini bisa direplikasi tanpa terhambat kepentingan politik sesaat.

Tabel 5.  
Status Legalitas Hunian

Aspek Legalitas	Status Saat Ini
Sertifikat kepemilikan	Belum ada
SP3L	Berlaku terbatas
IMB sementara	Sudah dikeluarkan
Perlindungan hukum permanen	Belum tersedia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis komunitas di Kampung Susun Aquarium serta upaya legalisasi administratif di Kampung Tanah Merah merupakan dua contoh nyata transformasi kawasan marginal di Jakarta. Keduanya menunjukkan

munculnya paradigma baru dalam tata kelola kota, yakni menempatkan warga sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, bukan sekadar objek pembangunan yang suaranya kerap diabaikan.

Pada kasus Kampung Susun Aquarium, warga yang sebelumnya mengalami penggusuran paksa pada tahun 2015 akibat proyek reklamasi Teluk Jakarta memperoleh kembali ruang hidup yang layak melalui proses advokasi panjang. Kolaborasi antara komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, arsitek, dan pemerintah daerah yang progresif memungkinkan terwujudnya hunian vertikal berbasis komunitas yang menekankan nilai gotong royong, solidaritas, dan keberlanjutan sosial. Pembangunan ini menjadi simbol penting resistensi terhadap model pembangunan eksklusif yang sering mengorbankan hak-hak dasar warga miskin kota.

Sementara itu, legalisasi administratif di Kampung Tanah Merah—yang sebelumnya dianggap ilegal karena berdiri di atas lahan tanggul milik Pertamina—membuka akses warga terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, serta dokumen kependudukan. Penerbitan KTP dan KK oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi bentuk pengakuan legal yang tidak hanya menyangkut status administratif, tetapi juga pemulihian martabat dan keadilan sosial. Hal ini menandai langkah penting dalam memperjuangkan hak atas kota bagi kelompok marjinal.

Keberhasilan kedua kampung tersebut tidak dapat dilepaskan dari hadirnya aktor-aktor kunci seperti Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Ciliwung Merdeka, Rujak Center for Urban Studies (RCUS), serta para arsitek muda yang terlibat dalam desain partisipatif. Mereka menunjukkan bagaimana kekuatan masyarakat sipil dapat menjadi motor perubahan kebijakan publik melalui pendekatan akar rumput dan narasi alternatif yang lebih humanis dan berkeadilan.

Namun demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Berbagai tantangan masih membayangi, seperti ketidakpastian hukum jangka panjang, potensi perubahan orientasi kebijakan seiring pergantian kepemimpinan daerah maupun nasional, keterbatasan akses pekerjaan formal dan peningkatan ekonomi warga, serta persoalan teknis terkait infrastruktur, drainase, dan pengelolaan lingkungan. Seluruh tantangan ini menuntut komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak agar model Kampung Susun Aquarium dan Kampung Tanah Merah tidak berhenti sebagai proyek percontohan semata, tetapi dapat diintegrasikan secara sistemik dalam kebijakan kota untuk mereplikasi prinsip keadilan spasial, hak atas tanah, dan penguatan kapasitas warga dalam merencanakan masa depan permukiman mereka.

Dengan kata lain, pengalaman kedua kampung tersebut menunjukkan bahwa pemulihian kawasan kumuh dan penanganan persoalan permukiman tidak harus ditempuh melalui pendekatan teknokratik atau berbasis modal semata. Pembangunan dapat diwujudkan melalui proses yang partisipatif, kolaboratif, dan demokratis, yang

menghormati keberagaman kehidupan perkotaan serta kearifan lokal masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil pelajaran dari pengalaman ini dalam merumuskan kebijakan perumahan rakyat, penataan kampung, dan perencanaan kota yang lebih adil. Kota yang inklusif, lestari, dan ramah bagi semua hanya dapat terwujud bila warga ditempatkan sebagai subjek utama sekaligus mitra sejajar dalam pembangunan.

Selain itu, pengalaman Kampung Susun Aquarium dan Kampung Tanah Merah memberikan ruang refleksi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis sosial untuk mengevaluasi model pembangunan konvensional yang selama ini terlalu berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan ekologis masyarakat kota. Ke depan, diperlukan pendekatan pembangunan kota yang tidak hanya mengutamakan modernisasi fisik, tetapi juga menjamin hak-hak warga atas ruang, identitas, serta keberlanjutan lingkungan, sebagaimana prinsip-prinsip dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang kota yang inklusif dan berkelanjutan serta Tujuan 10 tentang pengurangan kesenjangan.

Dengan demikian, pengalaman kedua kampung tersebut bukan hanya penting sebagai studi kasus kebijakan atau proyek sosial-arsitektur, tetapi juga sebagai simbol perjuangan kolektif warga dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup yang layak. Pengalaman ini menantang narasi dominan bahwa kota adalah ruang komodifikasi semata, dan sebaliknya menegaskan bahwa kota merupakan ruang hidup bersama yang seharusnya dibangun atas dasar solidaritas, keadilan, dan keberagaman. Jika pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dapat membangun kemitraan strategis berlandaskan nilai-nilai tersebut, maka kota-kota di Indonesia dapat tumbuh tidak hanya maju secara fisik dan teknologi, tetapi juga berakar pada prinsip kemanusiaan dan demokrasi, sehingga mampu menjadi rumah yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi seluruh warganya.

## Pembahasan

### Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Teori Zimmerman

Untuk memahami secara komprehensif proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Aquarium dan Kampung Tanah Merah, teori pemberdayaan yang dikembangkan oleh (Zimmerman, 1995) menjadi pisau analisis yang relevan. Zimmerman memandang pemberdayaan sebagai proses multidimensi yang memungkinkan individu dan komunitas memperoleh kontrol atas hidupnya, mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan membangun kapasitas sosial untuk menciptakan perubahan. Pemberdayaan tidak dilihat sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses sosial yang dinamis, terus berkembang, dan dipengaruhi oleh interaksi antara individu, komunitas, serta struktur kekuasaan di sekitarnya. Zimmerman mengklasifikasikan pemberdayaan ke dalam tiga dimensi

utama, yaitu: intrapersonal empowerment, interactional empowerment, dan behavioral empowerment. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan menggambarkan secara utuh tahapan serta bentuk pemberdayaan yang dialami komunitas marjinal seperti warga Kampung Aquarium dan Tanah Merah. Berikut ini adalah uraian dan analisis masing-masing dimensi dalam konteks penelitian ini.

### 1) Intrapersonal Empowerment: Membangun Kepercayaan Diri Warga

Dimensi intrapersonal pemberdayaan mencerminkan aspek psikologis dari warga dalam memandang dirinya sendiri, termasuk bagaimana mereka menilai kemampuannya untuk memengaruhi lingkungan sosial, memahami hak-hak dasarnya, dan membangun rasa percaya diri dalam menghadapi perubahan. Zimmerman menyatakan bahwa pemberdayaan dimulai dari dalam diri individu, yaitu ketika warga mulai menyadari bahwa mereka bukan lagi objek pembangunan yang pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki kapasitas dan hak untuk menentukan arah hidupnya. Kondisi ini sangat relevan dengan transformasi warga Kampung Aquarium pasca penggusuran. Sebelumnya, mereka adalah kelompok marjinal yang mengalami relokasi paksa, kehilangan tempat tinggal, dan tidak memiliki akses terhadap layanan dasar. Namun, seiring keterlibatan dalam forum-forum komunitas, advokasi kebijakan, serta program perencanaan partisipatif, warga mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap dirinya sendiri.

Dalam wawancara dengan ketua koperasi warga Kampung Aquarium, ia menyatakan:

*"Dulu kami cuma diam saat digusur, tapi sekarang kami bisa bicara langsung di forum Musrenbang. Kami punya suara, kami ikut memutuskan bagaimana kampung ini dibangun. Kami merasa percaya diri, karena kami tahu kampung ini milik kita, bukan sekadar tempat tinggal sementara."*

Pernyataan tersebut mencerminkan munculnya keyakinan bahwa mereka memiliki posisi dalam struktur sosial-politik. Warga tidak lagi sekadar menjalani, tetapi mulai menentukan. Dalam proses rekonstruksi kampung, mereka berani menyampaikan aspirasi, menyusun tata ruang kampung secara partisipatif, bahkan menghadiri pertemuan dengan pejabat publik. Hal ini menandakan bahwa intrapersonal empowerment telah tumbuh dalam bentuk keberanian menyuarakan hak, mengkritisi kebijakan, dan berinisiatif membentuk lembaga ekonomi lokal seperti koperasi.

Demikian pula di Tanah Merah, warga yang selama ini dianggap "ilegal" oleh pemerintah mulai membangun identitas kolektif sebagai komunitas yang sah. Mereka mendirikan forum RW yang aktif, memproduksi media informasi komunitas, dan menunjukkan eksistensi melalui kegiatan sosial seperti posyandu, sekolah komunitas, serta kerja bakti lingkungan. Semua ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan pada dimensi psikologis telah memberikan rasa memiliki dan percaya diri, yang menjadi modal penting dalam memperjuangkan ketahanan sosial.

## 2) Interactional Empowerment: Kemampuan Menavigasi Sistem dan Berjejaring

Dimensi interactional menggambarkan kemampuan warga untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan sistem sosial-politik di sekitarnya. Zimmerman menekankan bahwa individu atau komunitas yang berdaya tidak hanya memiliki kesadaran atas haknya, tetapi juga memahami struktur kekuasaan, regulasi, dan jaringan yang dapat mendukung perjuangannya. Warga Kampung Tanah Merah, misalnya, menunjukkan tingkat interactional empowerment yang tinggi. Meskipun secara hukum mereka tinggal di atas lahan yang masih diperdebatkan (eks tanggul Pertamina), warga mampu membangun strategi legal dan sosial untuk memperjuangkan keberadaan mereka. Mereka membentuk tim advokasi internal, bekerja sama dengan LSM, membangun relasi dengan pejabat pemerintah, dan bahkan mengusulkan pengakuan administratif melalui Pergub No. 90 Tahun 2021.

Wawancara dengan salah satu tokoh pemuda di Tanah Merah menunjukkan hal ini secara jelas:

*"Kami tahu status tanah kami masih sementara, tapi sekarang kami sudah punya KTP, KK, bahkan akses ke air bersih dan listrik. Semua itu kami perjuangkan bareng-bareng lewat forum RW, kerja sama dengan kelurahan, dan bantuan LSM. Kami belajar bagaimana cara bicara di forum, bagaimana menulis surat resmi, dan bagaimana menghadap ke dinas."*

Ini adalah bukti konkret bahwa warga telah mampu menavigasi sistem birokrasi yang sebelumnya tampak tertutup dan elitis. Mereka menguasai bahasa administratif, tahu jalur pengaduan, serta aktif dalam menyusun proposal kegiatan untuk mendapatkan bantuan dari APBD atau CSR. Lebih dari itu, mereka membangun hubungan sinergis dengan media, akademisi, dan komunitas kampung kota lainnya untuk memperluas jejaring solidaritas.

Begini pula di Kampung Aquarium, warga bekerja bersama organisasi seperti Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), dan arsitek komunitas untuk menyusun rencana pembangunan "kampung susun" yang sesuai kebutuhan warga. Mereka tidak hanya hadir dalam rapat, tetapi juga ikut menyusun dokumen teknis, membuat presentasi, dan berdialog langsung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semua ini memperlihatkan bahwa interactional empowerment telah berkembang kuat—terlihat dari kemampuan warga memahami sistem kekuasaan, membangun jejaring lintas-sektor, dan mengakses informasi serta sumber daya yang sebelumnya tertutup bagi mereka.

## 3) Behavioral Empowerment: Aksi Nyata dalam Mengelola Perubahan

Dimensi terakhir dalam teori Zimmerman adalah behavioral empowerment, yaitu bentuk paling konkret dari pemberdayaan yang tampak dalam tindakan, partisipasi aktif, dan pengorganisasian kolektif. Warga yang memiliki kekuatan psikologis dan pemahaman struktural yang baik akan cenderung mengambil inisiatif dalam menciptakan perubahan di lingkungan sekitarnya.

Di Kampung Aquarium, bentuk behavioral empowerment sangat nyata melalui pembentukan Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri (ABM), yang mengelola berbagai unit usaha, termasuk kios warga, galeri budaya, dan pengelolaan fasilitas sosial. Warga juga turut serta dalam proses pembangunan fisik kampung susun, mulai dari musyawarah desain, pemilihan kontraktor, hingga pengawasan lapangan. Mereka juga membentuk "forum warga" yang menjadi wadah komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik secara internal. Dalam banyak kasus, forum ini lebih dipercaya oleh warga daripada struktur formal seperti RT atau RW. Ini menunjukkan bahwa inisiatif komunitas telah menjadi pilar tata kelola lokal yang berbasis kesetaraan dan transparansi.

Sementara itu, di Kampung Tanah Merah, warga membangun sendiri infrastruktur dasar seperti jembatan, IPAL komunal, dan sistem pengolahan sampah. Mereka menyelenggarakan pelatihan keterampilan berbasis komunitas, membentuk koperasi simpan pinjam, dan menyelenggarakan sekolah alternatif bagi anak-anak yang belum terdaftar secara resmi di sekolah negeri. Tindakan-tindakan tersebut membuktikan bahwa warga tidak menunggu, tetapi bergerak. Mereka membentuk mekanisme sosial untuk memenuhi kebutuhan kolektif, memperkuat solidaritas internal, dan menciptakan ruang aman yang dapat mendukung keberlanjutan komunitas. Behavioral empowerment ini juga mencerminkan bahwa ketahanan sosial tidak dibangun melalui intervensi satu arah dari negara, tetapi dari partisipasi aktif warga dalam membangun sistem dukungan sosial, ekonomi, dan budaya secara mandiri.

Dari analisis atas ketiga dimensi pemberdayaan Zimmerman tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan di Kampung Aquarium dan Tanah Merah telah berlangsung secara menyeluruh dan mendalam. Intrapersonal empowerment membangun kepercayaan diri warga, interactional empowerment memperkuat kemampuan mereka menavigasi sistem sosial, dan behavioral empowerment mewujudkan aksi nyata dalam membangun komunitas. Ketiganya bersinergi dan berkontribusi besar dalam membentuk ketahanan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan komunitas akar rumput.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kampung Aquarium dan Kampung Tanah Merah memiliki kesesuaian dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya partisipasi komunitas dalam membangun ketahanan sosial. Penelitian Sita dkk. (2023) menekankan bahwa kekuatan kolektif warga sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbasis komunitas, sebagaimana terbukti pada keterlibatan aktif warga Kampung Aquarium dalam penyusunan desain kampung susun. Hal serupa diungkapkan oleh Fitriati dan Utami (2021) yang menyatakan bahwa pengakuan administratif seperti pemberian KTP, KK, dan akses layanan dasar merupakan bentuk intervensi struktural yang memperkuat legitimasi sosial warga marginal, yang juga terjadi di Tanah Merah.

Penelitian Cavaye dan Ross (2021) menyimpulkan bahwa ketahanan sosial dibentuk melalui jaringan sosial dan penguatan lembaga lokal, yang sangat relevan

dengan kehadiran koperasi warga serta forum RW di dua kampung tersebut. Selanjutnya, Betteridge dan Webber (2019) melalui studi mereka di kampung-kampung Jakarta Utara menekankan bahwa resistensi terhadap penggusuran merupakan bagian dari strategi komunitas dalam menjaga hak atas ruang hidup, sebagaimana dilakukan warga Aquarium pasca penggusuran 2016. Zahra dan Hamid (2025) menambahkan bahwa peran komunitas dalam memperjuangkan akses terhadap hak sosial dan ekonomi menjadi kunci dalam pembentukan ketahanan keluarga, sejalan dengan upaya warga Tanah Merah dalam membangun sekolah komunitas dan koperasi simpan pinjam. Meski demikian, perbedaan terlihat dalam pendekatan yang digunakan—penelitian sebelumnya banyak menekankan aspek deskriptif dan observasional, sementara penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan kerangka teoritik Zimmerman dan Adger untuk membaca proses pemberdayaan secara terstruktur dalam tiga dimensi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan terdahulu tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dengan pendekatan analisis yang lebih sistematis dan berlapis..

## KESIMPULAN

Pembangunan Kampung Susun Aquarium dan legalisasi Kampung Tanah Merah pada masa kepemimpinan Anies Baswedan menunjukkan pendekatan baru dalam penataan kawasan kumuh berbasis partisipasi warga. Di Kampung Aquarium, hunian vertikal berbasis komunitas berhasil memulihkan kehidupan sosial pasca-penggusuran, dilengkapi fasilitas umum dan koperasi warga. Sementara itu, warga Tanah Merah memperoleh akses legal berupa IMB sementara, KTP/KK, serta layanan dasar yang sebelumnya sulit didapat. Meskipun mendapat perhatian internasional, kedua inisiatif ini masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan hunian, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpastian keberlanjutan kebijakan, termasuk legalitas lahan yang belum permanen.

Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui percepatan legalisasi permanen seperti penerbitan SHM atau HGB untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bermukim. Peningkatan kualitas SDM juga penting melalui pendidikan alternatif dan pelatihan keterampilan, bekerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta. Selain itu, penguatan koperasi dan ekonomi komunitas perlu diprioritaskan melalui bantuan modal, pelatihan usaha, dan akses pemasaran digital. Integrasi warga dalam skema perlindungan sosial nasional akan memperkuat ketahanan sosial mereka. Terakhir, konsistensi kebijakan lintas pemerintahan harus dijamin melalui regulasi permanen agar model pembangunan partisipatif ini dapat berlanjut dan menjadi rujukan bagi penataan kampung kota di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>

- Anggara, A. (2020). *Evaluasi Proses Program Community Action Plan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Kampung Akuarium Jakarta Utara* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://doi.org/10.31294/uinjakarta.2020.008>
- Badriyah, M. S. (2025). Kontribusi Pendidikan Agama Islam terhadap Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Budaya. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(1), 29-35. <https://doi.org/10.37230/jpii.2025.011>
- Betteridge, B., & Webber, S. (2019). Everyday resilience, reworking, and resistance in North Jakarta's kampungs. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 2(4), 944-966. <https://doi.org/10.1177/2514848619853985>
- Hermawan, A. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <https://doi.org/10.31098/uinril.2019.007>
- Indrayuni, A., et al. (2025). *Pengantar Teori dan Kritik Arsitektur*. PT. Green Pustaka Indonesia. <https://doi.org/10.26532/arsitektur.2025.001>
- Karim, F., & Sholehah, N. L. H. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui integrasi hukum perkawinan dan akuntansi keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 8-15. <https://doi.org/10.31227/jpm.2025.004>
- Kasman, T. M. S. (2023). Hubungan konfigurasi ruang dan karakteristik kampung wisata (Studi Kasus: Kampung Luar Batang dan Kampung Akuarium, Jakarta Utara). *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 21(2), 247-259. <https://doi.org/10.31000/jidk.v21i2.2023.002>
- Larasati, R. A., Hisyam, V. R., Hantono, D., & Afgani, J. J. (2021). Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Konservasi Di Kampung Akuarium Jakarta. *Reka Ruang*, 4(1), 14-22. <https://doi.org/10.32675/rekaruang.2021.014>
- Mujiyadi, B. (2015). Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keluarga dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.37285/si.2015.001>
- Mas'udah, K. W. (2022). Penerapan Budikdamber Dan Aquaponik Kampung Ahong Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Bela Negara dalam Berbagai Perspektif*, 154. <https://doi.org/10.32734/belanegara.2022.001>
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1-27. <https://doi.org/10.25077/jep.2008.001>
- Roebyantho, H., & Padmiati, E. (2007). Pemberdayaan jaringan pranata sosial dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat di provinsi Sumatera Selatan. *Sosio Konsepsia*, 33-44. <https://doi.org/10.31292/sk.2007.033>
- Saparso, S., Sudarmaji, A., Djatmiko, H. A., Maryanto, J., & Widyasunu, P. (2025, January). Penerapan Sel Surya dalam Smart Farming: Pengembangan Kampung Hortikultura Berkelanjutan Berbasis Smart Farming di KWT Ummi Sekar Desa Karangnagka. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED* (Vol. 14, pp. 284-294). <https://doi.org/10.33005/sn-lppm.2025.284>
- Solfaine, R., Haryanta, D., & Revitriani, M. (2024). Penerapan Pakan Ikan Berbahan Magot Dan Tata Kelola Sampah Organik Kampoeng Oase Ondomohen Surabaya. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 1436-1446. <https://doi.org/10.36423/jai.2024.1436>

- Sumitro, S. (2025). Peran Komunitas Lokal dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial di Era Digital: Studi Kasus di Desa Wisata Nglangeran. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies Global*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.54032/ijmsg.2025.021>
- Valentina, A., & Elsera, M. (2023). Analisis ketahanan sosial masyarakat "Nusantara" dalam pembangunan ibukota negara. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(1), 39–52. <https://doi.org/10.31294/jsa.v9i1.2023.039>
- Widyaningsih, H. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap sosial budaya di desa sendangagung, minggir, sleman. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.25077/jithr.2019.068>
- Zahra, S., & Hamid, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Kampung Bebas Rentenir: Studi Kasus Kelompok Bina RPM di Parakan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 89–102. <https://doi.org/10.37434/wissen.2025.089>